

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI *LEASING* BERDASARKAN

PSAK No. 30 PADA PT. BUMI JASA UTAMA



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2017

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI *LEASING* BERDASARKAN

PSAK No. 30 PADA PT. BUMI JASA UTAMA

**ROSMIATI
10573 04473 13**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamammadiyah
Makassar Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Jurusan Akuntansi*

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi *Leasing* Berdasarkan PSAK No.
30 Pada PT. Bumi Jasa Utama

Nama Mahasiswa : Rosmiati
No. Stambuk : 105730 4473 13
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H Abd Rahman Rahim, SE., MM

NIDN : 0925086302

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA

NIDN : 0915058801

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Ismail Rasulong, SE., MM

NIDN : 0905107302

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA

NIDN: 0915058801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Rosmiati, Nim 105730447313 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Muharram 1439 H

Makassar,

07 Oktober 2017 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

(Rektor Unismuh Makassar)

Dr. Rahman Rahim

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Ismail Rasulong

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda., MM

(Wakil Dekan Fakultas Ekonomi)

Drs. H. Sultan Sarda

4. Penguji:

a. Drs. H. Sultan Sarda., MM

b. Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA

c. Muh Nur Raşyid, SE., MM

d. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., AK., CA

(Signatures of Examiners)

Linda Arisanty Razak

MOTTO

“Ujian bukanlah untuk mengukur kepandaian tapi untuk mengenali kepatuhan kita kepada proses belajar ”

(Mario Teguh)

“Kesuksesan adalah impian setiap orang. Orang yang sedang berjuang tentu saja memimpikan kesuksesan. Berawal dari impian itu, selanjutnya direalisasikan melalui kerja keras dan doa yang sungguh-sungguh.”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan urusan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(QS, Alam Nasyirah: 6-7)

*Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku,
kakakku, keponakanku dan keluarga besarku
tercinta sebagai tanda hormat dan baktiku
atas segala doa dan pengorbanan
yang diberikan selama ini*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Rahmat Allah SWT, Segala puji dan Syukur Penulis Haturkan Kehadirat Allah SWT telah melimpahkan berkat dan anugrah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh manusia yaitu *ad-Dinul Islam* yang kita harapkan dapat membawa syafaatnya di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam rintangan dan hambatan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan atas segala apresiasi yang telah di sumbangkan kepada penulis serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, MM sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE,MM sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.si,Ak.,CA Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, MM sebagai Rektor sekaligus Pembimbing I

5. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.si,Ak.,CA Sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Sekaligus Pembimbing II
6. Bapak –Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas muhammadiyah Makassar, khususnya pada jurusan akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam proses pendidikan.
7. Seluruh staf fakultas ekonomi dan bisnis dan jurusan akuntansi yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan selama penulis menuntut ilmu.
8. Pimpinan PT. Bumi Jasa Utama Makassar beserta seluruh stafnya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuannya bagi penulis.
9. Teristimewa kepada Ibunda tercinta, Suherni dan Reddo yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, doa restu, semangat, dan pesan-pesan yang sangat berarti dalam hidup ini.
10. Teristewa juga kepada kakak-kakakku Salman dan Salmiati yang sepenuhnya memberi dukungan, bantuan dan doa-doanya. Ponakkanku yang aku banggakan, dan semua keluarga yang saya cintai.
11. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2013. Terkhusus kelas AK-10-2013 senantiasa saling member semangat, motivasi dan saling mengutamakan kebersmaan.
12. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terkhusus kepada Pimpinan Komisyariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi
13. Terima kasih kepada kakanda Aurora Arifah Husni, Hasmiati, Indriana,

Riska Kartika Wijaya, Muslimah Putri Mardewi, Nurlisah, Ahmad Hidayat US, Abdul Wahid, Asrawan, Heri setiawan dan Amin yang selalu memberikan semangat dan dikala penulis mulai menyerah

14. Terima kasih juga kepada adinda Herwin Salim, syamsul, Abdul Raswin, Andi Hakib, Muflihuddin, Ahmad Fatohana akbar, Muh. Faisal, Hamsyar, Isti Jumilda Prancang, Intan Hartina, Ismawati, Andi Trisdayanti, dan Any Surkati yang senantiasa mendoakan dan member semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
15. Terima kasih kepada Adinda pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhusus kepada departemen bidang Tablig dan Kajian Keislaman yang selalu membantu baik moril maupun non moril.
16. Terima kasih kepada kakanda KAMI ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu membantu kami.
17. Terima kasih kepada adinda Adinda pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa selalu mendoakan kami dan memberi semangat.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat

Makassar, 17 Juni 2017

ROSMIATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusalan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian akuntansi sewa guna usaha (<i>leasing</i>)	7
B. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha	19
C. Penelitian Terdahulu	28
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Metode Pengumpulan Data	38
C. Jenis Data	39
D. Sumber Data.....	39
E. Definisi Operasional.....	40
F. Metode Analisis Data.....	40

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Bumi Jasa Utama Makassar.....	41
B. Visi dan Misi PT. Bumi Jasa Utama Makassar.....	45
C. Struktur Organisasi	46
D. Job Description	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis	54
B. Pembahasan.....	60

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

2.2 Skema Kerangka Pikir.....	35
4.1 Stuktur Organisasi	48



DAFTAR TABEL

2.1 Jurnal Terdahulu.....	31
5.1 daftar amortisasi <i>leasing</i>	59
5.2 Skedul Beban Depresiasi, Akumulasi Depresiasi	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian Indonesia dunia yang begitu cepat menyebabkan terjadinya kompetisi yang ketat diantara pelaku pasar dalam penyediaan modal. Disamping itu terjadi, terjadinya peningkatan pelayanan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang melahirkan berbagai produk pasar yang serba memudahkan konsumen. peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yang diadakan oleh para pelaku pasar, bukannya tidak berisiko bagi investasi, karena para investor lebih, menyukai suatu produk pelayanan yang memiliki aspek legalitas, seperti suatu aturan dan Perundang-undangan yang menjamin usaha tersebut.

Leasing bukan merupakan fenomena baru, namun di Negara-negara berkembang, inisiatif menawarkan *Leasing* bagi usaha kecil dan mikro masih sangat jarang. Hal ini sangat mengejutkan mengingat *Leasing* memiliki manfaat besar atas kredit. Manfaat yang paling penting adalah bahwa pengusaha dapat memulai peralatan sebelum mereka benar-benar memilikinya. Artinya, periode pembayaran angsuran *leasing*, pengusaha telah dapat mereliasasikan pendapatan ekstra melalui pengguna peralatan tersebut.

Lembaga pembiayaan *leasing* dalam terjemahan di Indonesia disebut dengan sewa guna usaha yaitu suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat produksi. Fasilitas yang diadakan perusahaan pembiayaan sangat meringankan

konsumen atau pasar yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha, maka *leasing* menjadi alternative. *Leasing* adalah suatu usaha dimana *lessee* pada akhir masa kontrak yang mempunyai hak opsi untuk membeli.

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam system kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari tiga pihak yang berbeda, yaitu *lessor* (sebagai pemilik modal) *lessee* (sebagai pemakai modal), *supplier* (sebagai pihak ketiga). Hubungan *lessor* dan *lessee* adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntunan kewajiban dan kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian *financial* atau kontrak *leasing* atau suatu perjanjian pembiayaan.

Eksistensi lembaga *leasing* itu sendiri menjadi perdebatan sendiri, apakah lembaga jual beli, sewa beli, jual beli dengan angsuran atau sewa menyewa dengan opsi membeli barang tersebut, berkaitan dengan hak kebendaan yang ada pada salah satu pihak yang menyangkut batas-batas hak dan tanggung jawabnya. Tidak jarang hubungan *lessor* dan *lessee* hanya harmonis pada awal perjanjian, pada saat satu pihak membutuhkan sesuatu (modal pembiayaan) dan pihak lain berusaha mendapatkan keuntungan, selanjutnya hubungan keduanya diwarnai berbagai persoalan dan yang utama serta yang paling sering adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari pada *lessor*.

Melihat perkembangan kegiatan sewa guna usaha, maka perlu adanya suatu standar akuntansi keungan yang mengatur tentang sewa guna usaha yang dapat dijadikan pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi sewa guna

usaha dalam pelaporan, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi tersebut harus dapat memberikan suatu rangkaian historis dari sumber-sumber ekonomi, kewajiban-kewajiban perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut.

Leasing sebagai suatu alternative untuk pembiayaan banyak menunjukkan tujuan dalam mengembangkan sector swasta. Hingga sekarang sulit bagi banyak perusahaan untuk memperoleh pembiayaan bagi pembelian barang modal. Dengan diperkenalkannya system pembiayaan *leasing* di Indonesia, perusahaan-perusahaan sekarang banyak memperoleh pembiayaan 100% untuk jangka waktu 4 atau 5 tahun, tergantung dari jenis, modal yang hendak di peroleh (Herman,2006:200).

Salah satu perusahaan yang terbesar di Makassar seperti Kalla Group merupakan suatu kelompok usaha terbesar di Kawasan Timur Indonesia, kendali usaha perusahaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun bidang usaha inti meliputi otomotif, konstruksi, property, energy, dukungan pendanaan otomotif dan logistic, transportasi dan hutan karbon. Sejalan dengan pesatnya perkembangan di Kawasan Timur Indonesia sebagai wujud kepedulian dalam mendukung pembangunan di Wilayah ini, Kalla Group berkomitmen menciptakan terobosan baru guna memberikan manfaat lebih kepada masyarakat luas di Negara tercinta, Indonesia.

PT. Bumi Jasa Utama (Kallrent) merupakan jasa usaha jasa penyewaan kendaraan dari PT. Bumi Jasa Utama yang lahir dari jaringan bisnis Kalla Group yang telah memiliki pengalaman di dunia usaha selama lebih dari 61 tahun, dengan jaringan kantor cabang pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kallarent saat ini telah mampu memberikan kendaraan dari berbagai jenis dan tipe. Melalui dedikasi yang kuat Kallarent mampu memberikan keuntungan dan kepuasan bagi para pelangganya. Kallarent mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kenyamanan, kepercayaan, ketetapan dan keselamatan melalui pengalaman perusahaan.

Sejalan dengan waktu, permasalahan yang menyebabkan *Leasing* semakin banyak dan kompleks. Ada *leasing* dari jenis biasa dan ada pula yang rumit. Perbedaan ini memiliki perbedaan pajak penghasilan badan akhir tahun. *Capital lease* dan *operating lease* sama-sama dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pemotongan pajak penghasilan, hal ini diperlukan sebagai sewa menyewa biasa. Biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi *lease* dianggap sebagai biaya usaha pihak *lease*.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30 yaitu tentang sewa. Dalam PSAK No. 30 dijelaskan tentang criteria pengelompokan transaksi sewa, perlakuan akuntansi oleh sewa (*lessor*), perlakuan akuntansi penyewa (*lessee*), pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa oleh perusahaan penyewa. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengenal lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi *leasing* sehingga judul penelitian ini adalah “**Perlakuan**

akuntansi *leasing* berdasarkan PSAK No. 30 Pada PT. Bumi Jasa Utama Makassar.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah “Apakah Perlakuan Akuntansi *Leasing* sudah sesuai dengan PSAK No.30 Pada PT. Bumi Jasa Utama Makassar.

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi *leasing* sudah sesuai PSAK No.30 Pada PT. Bumi Jasa Utama Makassar.

C. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi *Leasing* berdasarkan PSAK NO.30
- b. Sebagai saran dan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam perusahaan dalam menilai dan meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi *leasing* berdasarkan PSAK No.30

b. Menambah pengetahuan yang lebih mendalam baik teori maupun praktek yang diterapkan dalam bidang akuntansi khususnya transaksi sewa guna usaha (*leasing*)

3. Manfaat Kebijakan

PT. Bumi Jasa Utama Makassar mengenai Perlakuan Akuntansi *Leasing* berdasarkan PSAK No.30



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi dan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing ahli yang memberikan definisi atas akuntansi. Secara umum akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. Pengertian ini menekankan pada peranan akuntansi, yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan para pemakai daftar keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu (Kasmir, 2013:242).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia *leasing* adalah suatu perjanjian dimana *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi perjanjian *leasing* terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. *Lessor* atau penyedia barang modal (*aktiva*).
2. *Lessee* yaitu pihak yang memakai barang modal (penyewa guna usaha).
3. Adanya perjanjian yang sifatnya tidak bisa dibatalkan (*non cancelled*)
4. Adanya barang modal atau aktiva yang *dileasingkan* (*aktiva*).
5. Adanya hak pilih (opsi) bagi *lessee* setelah berakhirnya kontrak *leasing* untuk membeli atau barang modal (*aktiva*) yang bersangkutan.
6. Adanya pembayaran secara berkala atau angsuran.
7. Adanya nilai sisa yang diperoleh bersama.

Kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-122/MK/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 dan No.30 /KPB/I/74 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang “Perijinan Usaha *Leasing*”. Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dalam dunia usaha.

Dalam finance , *lessee* biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama *lessor* melakukan pemesanan, pemeriksaan dan pemeliharaan barang modal yang menjadi objektif transaksi *leasing*. *Operating* adalah kegiatan *leasing* dimana *lessee* tidak *operating*, *lessor* sebagai pemilik barang modal mekan barang modal tersebut seperti asuransi, pajak

Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (*joint venture*) bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha di Indonesia, disamping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan perbankan. Perluasan cara-cara pembiayaan tersebut sejalan dengan definisi *leasing* atau sewa-guna-usaha sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 SKB Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian tersebut diatas yang menyatakan: sewa guna usaha ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Definisi tersebut nampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut *finance* atau sewa guna usaha pembiayaan. Namun demikian dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 dan mendefinisikan sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Mengutip dari PSAK No. 30 juga mendefinisikan sewa guna usaha sesuai dengan *leasing*, *leasing company*, dan *lessee* sebagai berikut:

- a. *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk pembiayaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
- b. Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company lessor*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dalam bentuk *finance* maupun secara *operating* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- c. Penyewa guna usaha (*lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak *lessor*. Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa dan menjadi objek sewa guna usaha adalah barang modal.

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik secara sewa guna usaha hak opsi (*finance*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating*) untuk digunakan oleh selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala (Herman, 2006:200)".

Kegiatan sewa guna usaha yang digolongkan sebagai sewa usaha dengan hak opsi apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutupi harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
2. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3(tiga) tahun untuk barang modal golongan II,III dan tujuh tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Sedangkan sewa guna usaha (*leasing*) tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha dimana *lessee* pada _akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi membeli objek sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewagunausahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*
2. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Dari segi pandangan hukum, kegiatan sewa guna usaha memiliki 5 (lima) ciri yaitu:

- 1) Perjanjian antara *lessor* dengan pihak *lessee*.
- 2) Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, *lessor* mengalihkan hak
- 3) Penggunaan barang kepada pihak *lessee*.

- 4) *Lessee* membayar kepada *lessor* uang sewa untuk penggunaan barang (asset)
- 5) *Lessee* mengembalikan barang tersebut kepada *lessor* pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut.

Jika dibandingkan dengan kredit perbankan, pembiayaan investasi melalui *leasing* lebih memberikan kemudahan-kemudahan karena pengusaha tidak perlu menyediakan collateral (agunan) asset yang diperoleh melalui *leasing* merupakan jaminan bagi *lessor* mengingat status kepemilikan barang modal objek *leasing* berada pada *lessor*, sampai perjanjian (Frianto,2015:110).

a. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Jenis-jenis sewa guna usaha adalah:

1. Finance (Sewa Pembiayaan)

Dalam *finance*, *lessor* mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. *Finance* menimbulkan beban penyusutan untuk asset yang dapat disusutkan dan beban keuangan dalam setiap periode akuntansi. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, asset sewaan harus disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dengan umur ekonomis/manfaat asset sewaan (Sukrisno,2010:114).

Ciri-ciri *finance* :

- a. Sewa mengalihkan kepemilikan asset kepada *lessee* pada akhir masa sewa

- b. *Lessee* mempunyai opsi untuk membeli asset pada harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
- c. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis asset meskipun hak milik tidak dialihkan.
- d. Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar asset sewaan.
- e. Asset sewaan bersifat khusus dan hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.

Pembayaran sewa minimum yang dilakukan *lessee* meliputi pembayaran minimum terutang selama masa sewa hingga tanggal pelaksanaan opsi pembelian dan pembayaran yang dipersyaratkan untuk melaksanakannya.

2. *Operating* (sewa menyewa biasa)

Dalam *operating* , tidak terjadi pengalihan seluruh resiko dan sewa dalam *operating* tidak memasukkan biaya jasa seperti biaya asuransi dan pemeliharaan, serta diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus. *Lessor* yang melakukan penyusutan serta menanggung biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh pendapatan sewa dan mengakuinya sebagai beban (Sukrisno,2010:115).

3. *Sales and back* (Transaksi Jual dan Sewa Balik)

Sales and back meliputi penjualan asset dan penyewaan kembali asset yang sama. Berdasarkan jenis sewanya, *sales and back* dibagi menjadi dua:

- a. *Sales and back* merupakan *finance*

Transaksi tersebut merupakan alat bagi *lessor* memberikan pembiayaan bagi *lessee* dengan asset sebagai jaminan.

b. *Sales and back* merupakan *operating*

Jika pembiayaan sewa harta serta asset harga jual dilakukan pada nilai wajar, maka transaksi penjualan normal telah terjadi sehingga laba atau ruginya harus segera diakui.

Perjanjian atau kontrak kondisi dan persyaratan transaksi *leasing*, persyaratan-persyaratan dalam perjanjian tersebut antara lain memuat jangka waktu barang yang akan digunakan, jumlah dan cara pelaksanaan angsuran *leasing*, spesifikasi barang yang akan *dileasingkan*, dan persyaratan pengalihan pada akhir masa kontrak *leasing* (Herman,2006:202)

b. Perjanjian Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Perjanjian yang dibuat antara *lessor* dengan *lessee* disebut “*agreement*”, dimana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, *lessor* dan *lessee* (Kasmir,2013:247)

Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain:

1. Nama dan alamat *lessee*.
2. Jenis barang modal diinginkan.
3. Jumlah atau nilai barang yang *dileasingkan*.
4. Syarat – syarat pembayaran.
5. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya.
6. Biaya-biaya yang dikenakan.
7. Sangsi-sangsi apabila *lessee* ingkar janji.

Jika seluruh persyaratan tersebut sudah disetujui, maka pihak *lessor* akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung risiko kemacetan pembayaran oleh *lessee*. Namun, dalam praktiknya dapat pula sebelum nasabah mengajukan permohonan ke perusahaan *leasing*, pihak *lessee* terlebih dulu melakukan negosiasi dengan supliernya, kemudian barulah mencari perusahaan *leasing* yang akan menjadi *lessornya* (Kasmir,203:247).

c. Proses Transaksi *Leasing*

Lessee menghubungi supplier untuk penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual yang akan *dilease*. (Frianto, 2005:114).

1. *Lessee* bernegosiasi dengan *lessor*
2. *Lessor* mengirim *letter of offer* yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan.
3. *Lessor* dan *lessee* menandatangani kontrak dengan cakupan : pihak-pihak yang terkait, hak milik, jangka waktu, jasa *leasing*, opsi bank *lessee*, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek perpajakan, dan jadwal pembayaran angsuran sewa.
4. *Lessor* mengirim order beli serta instruksi pengiriman pada supplier.
5. *Supplier* mengirim barang dan *lessee* mengeceknya, jika sesuai, *lessee* menandatangani surat tanda terima, perintah bayar yang diserahkan kepada supplier.
6. *Supplier* menyerahkan dokumen kepada *lessor*.

7. *Lessor* membayar kepada *supplier*
8. *Lessee* membayar sewa berkala kepada *lessor*.

d. Keunggulan *Leasing* Secara Ekonomi

Menurut Frianto (2005:117), keunggulan dari *leasing* secara ekonomi diantaranya:

1. Pembiayaan penuh (100%) tanpa uang muka.
2. Persyaratan relative tidak ketat, tanpa syarat jaminan tertentu.
3. Pembayaran angsuran relative.
4. Tidak harus dicantumkan dalam neraca (*off balance sheet*)
5. Terlindung dari resiko berskala besar.
6. Pembiayaan proyek berskala besar
7. Tingkat keamanan pembiayaan lebih terjamin.

Sedangkan kerugian-kerugian yang dapat timbul bagi pihak dalam bentuk perjanjian pembiayaan adalah:

1. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan.
2. Biaya bunga dalam perjanjian pembiayaan lebih besar daripada biaya bunga pinjaman bank.
3. Seandainya terjadi pembatalan perjanjian suatu, maka kemungkinan biaya yng akan timbul cukup besar
4. Hak kepemilikan mungkin dianggap lebih memberikan kepuasan kepada si pemilik

5. Kemungkinan hilangnya kesempatan memperoleh benefit dari *residual value*.
6. Tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan *leasing* merupakan resiko usaha, bahkan tidak jarang *lessor* kehilangan obyek *leasing*. Kerugian-kerugian yang dialaminya oleh perusahaan *leasing* atau *lessor*, karena status barang masih miliknya dan *lessee* hanya memiliki opsi membeli, setelah berakhirnya pembayaran angsuran.
7. Salah satu klausa penting dalam perjanjian *leasing* yang menjadi pegangan *lessor* untuk keamanan investasinya adalah larangan pengalihan obyek *leasing* selama terjadi perpindahan hak oleh *lessee* karena sebab-sebab ekonomi, dengan terpaksa untuk efisiensi mengalihkan baik melalui sewa menyewa maupun pengalihan obyek *leasing* kepada pihak lain juga biasa dialami oleh lembaga pembiayaan *leasing* Buana finance. Kebutuhan akan modal tambahan menyebabkan *lessee* melakukan tindakan-tindakan praktik dengan menjual atau menyewakan obyek *leasing* tanpa sepengetahuan Buana Finance sebagai *lessor*.

e. Metode Pembayaran Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Pengaruh financial yang timbul dari transaksi *leasing* adalah berapa besarnya uang sewa atau angsuran yang harus dibayar kepada *lessor* sampai akhir periode kontrak. Besarnya angsuran yang dibayarkan oleh *lessee* terdiri atas unsur bunga atau cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo

pokok. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu *payment in advance* dan *payment in arrears*.

1. *Payment In Advances*

Yaitu pembayaran sewa yang dilakukan di muka pada saat kontrak disetujui. Perlu diingat bahwa pembayaran sewa tersebut merupakan jumlah amortisasi atau saldo pokok karena sebenarnya dalam jumlah tersebut belum ada perhitungan bunga didalamnya.

2. *Payment In Arrears*

Yaitu sewa dibayar di belakang. Pembayaran sewa dengan cara ini unsure bunga dan pembayaran cicilan pokoknya langsung dihitung. Besarnya pembayaran sewa setiap periodenya ditentukan oleh factor-faktor antara lain sebagai berikut:

a) Nilai Barang Modal

Nilai barang modal pada prinsipnya merupakan penjumlahan harga barang modal dengan nilai sisanya pada akhir periode kontrak. Nilai tersebut merupakan nilai kontrak *leasing*.

b) Simpanan jaminan

Simpanan jaminan dalam transaksi jual beli biasa fungsinya barangkali dapat dikatakan sebagai uang jaminan atau uang muka *lessee* atas suatu kontrak *leasing*. Besarnya simpanan jaminan ini tergantung pada kesepakatan antara *lessor* dengan *lessee*. Dalam hubungannya dengan pembayaran sewa, semakin besar simpanan jaminan, semakin kecil pembayaran sewanya.

f. Nilai Sisa

Adalah perkiraan wajar atas nilai suatu barang modal yang di pada akhir masa kontrak. Pada akhir kontrak ini sering nilai sisa tersebut jumlahnya relatif lebih besar terutama apabila umur ekonomis barang modal yang di akan di disewakan tersebut melebihi jangka waktu kontrak.

g. Jangka waktu

Jangka waktu kontrak *leasing* secara teoritis, dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang modal tersebut. Namun dalam praktiknya, proyeksi arus kas *lessee* merupakan factor yang sangat penting dalam penentuan jangka waktu leasing. Semakin lama waktu ini semakin rendah pula pembayaran sewa.

h. Tingkat bunga

Tingkat bunga yang umum digunakan dalam perhitungan pembayaran *leasing* adalah bunga efektif yang ditetapkan oleh lessor yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dan ditambah dengan tingkat keuntungan yang diinginkan *lessor*. Tingkat keuntungan ini sering juga disebut *spread*.

B. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha

1. Menurut PSAK 30

Sebelum terbitnya PSAK NO.30 perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa guna usaha di Indonesia belum mencapai tahap keseragaman. Hal ini banyak disebabkan karena pengaruh dari tata cara yang dilakukan oleh para penanam modal yang berasal dari berbagai Negara (Iman, 2009:428).

PSAK NO.30 tentang sewa mengatur bahwa suatu sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset.

Sesuai PSAK NO.30 terkait dengan akuntansi sewa guna usaha (*leasing*), maka perlakuan akuntansi untuk asset dalam sewa pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual:

- a. Disajikan sebagai asset tersedia untuk dijual, jika jumlahnya tercatat terutama dapat dipulihkan melalui transaksi penjualan dari pada penggunaan lebih lanjut.
- b. Diukur sebesar nilai yang lebih rendah antar jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan asset tersebut.
- c. Diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan evaluasi dampak keuangan adanya perubahan penggunaan asset.

Perlakuan akuntansi untuk *leasing* disesuaikan dengan jenis sewanya masing-masing:

- 1) **Financial** : selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual *lessee*, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.
- 2) **Operating** : jika transaksi terjadi pada nilai wajar maka laba/rugi harus diakui tetapi jika terjadi dibawah nilai wajar maka lab/rugi harus diakui segera kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa dimasa

depan lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan asset. Jika harga jual diatas nilai wajar selisih lebih tersebut ditangguhkan dan diamortisasikan selama periode penggunaan asset.

a) Perlakuan Akuntansi oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*)

Kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan setelah didefinisikan barulah dilakukan pencatatan. Berikut ini akan dijelaskan cara memperlakukan transaksi yang terjadi menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK N0.30). Perlakuan akuntansi berbeda-beda pada tiap transaksi pada setiap jenis .

1. Pada *Capital*

- a) Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha.
- b) Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha.

- c) Aktiva yang disewagunausahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
- d) Kalau aktiva yang disewa guna usaha yang dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun yang berjalan.
- e) Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.
- f) Dalam hal melakukan penjualan dan penyewa kembali (*sales and back*) maka transaksi tersebut harus dilakukan sebagai dua transaksi terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan dan kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewagunausahakan apabila *back* merupakan *capital* atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila *back* merupakan *operating*.

Berikut ini adalah contoh pencatatan akuntansi atas transaksi sewa guna usaha dengan metode *capital* pada buku *lessee*.

- a) Pada saat *lessor* memperoleh aktiva

aktiva sewa guna – *capital* xxx

hutang sewa guna usaha – *capital* xxx

b) Mencatat PPN pada saat memperoleh aktiva

Aktiva sewa guna usaha- <i>capital</i>	xxx	
PPN Masukan		xxx

c. Pada saat pembayaran angsuran

Hutang Sewa Guna Usaha – <i>capital</i>	xxx	
Kas		xxx

Mencatat pembayaran bunga yang berhubungan pada akhir tahun pertama:

Beban bunga	xxx	
Hutang bunga		xxx

a) Mencatat penyusutan

Beban penyusutan- <i>capital</i>	xxx	
Akumulasi penusutan – <i>capital</i>		xxx

b) Opsi membeli di akhir periode *leasing*

Aktiva tetap	xxx	
Akumulasi penyusutan		xxx
Aktiva Sewa Guna Usaha – <i>capital</i>	xxx	
Akumulasi penyusutan aktiva tetap		xxx
Kas		xxx

Metode penyusutan perlakuan akuntansi *finance* dengan metode garis lurus :

Rumusnya:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{HP-NS}}{\text{UE}}$$

2. Pada Sewa Menyewa Usaha Biasa (*operating*)

Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama pada setiap periode.

Barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan.

d. Perlakuan Akuntansi Oleh Perusahaan Sewa guna usaha (*lessor*)

Berbeda dengan pihak *lessee*, *lessor* memperlakukan transaksi sebagai berikut:

1. Pada *Finance*

- a) Penanaman netto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman netto sewa guna usaha. Jumlah penanaman netto terdiri dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang akan diterima oleh perusahaan sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dikurangi dengan pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (*unearned income*), dan simpanan jaminan (*security income*).

- b) Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan perolehan aktiva yang disewagunausahakan diperlukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (*unearned income*).
- c) Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan tingkat pengembalian berkala (*periodic rate of return*) atas penanaman netto perusahaan sewa guna usaha .
- d) Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman netto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.
- e) Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan.

2. Pada operating

- a) Barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan.
- b) Pembayaran sewa guna usaha (*payment*) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.

- c) Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarakan taksiran masa manfaatnya
- d) Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai kauntungan atau kerugian tahun berjalan.

e. Pelaporan Akuntansi Capital Lease Oleh Penyewa Guna Usaha Menurut Psak No.30 Adalah :

- 1) Aktiva yang di sewa guna usahakan di laporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya.
- 2) Pengungkapan yang layak harus di cantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah pembayaran sewa guna usahakan paling tidak dua tahun berikutnya.
 - b) Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan yang di bebaskan dalam tahun berjalan.
 - c) Jaminan yang di berikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha
 - d) Keuntungan atau kerugian yang di tangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (*sale and leaseback*)
 - e) Ikatan-ikatan penting yang di persyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha.

Finance lease- lessor:

- 1) Aktiva yang di laporkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kewajiban diurutkan berdasarkan jatuh temponya tanpa mengelompokkan ke dalam unsur lancar dan tidak lancar.

Operating lease- lessor

- 1) Barang modal yang disewa guna usahakan di laporkan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan
- 2) Aktiva yang disewa guna usahakan di laporkan secara terpisah dari aktiva tetap yang tidak di sewa guna usakan.
- 3) Perhitungan laba rugi harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan di laporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya.
- 4) Penyusutan aktiva yang disewa guba usahakan harus di laporkan secara terpisah dari aktiva yang tidak di sewa guna usahakan
- 5) Pengungkapan yang layak harus di cantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kebijakan akuntansi yang penting yang di gunakan sewa guna usaha
 - b) Jumlah pembayaran sewa guna usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya
 - c) Sifat dari pinjaman
 - d) Aktiva yang di sewagunausahakan yang di jaminkan kepada pihak ketiga.

C. Penelitian Terdahulu

Wulandari dkk, (2016) meneliti mengenai Analisis Pembiayaan Melalui *Finance* dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi *Leasing* Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tanjung Pinang berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa criteria klasifikasi sewa guna usaha yang diterapkan didalam PSAK No.30 tentang sewa Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tanjung Pinang merupakan suatu sewa pembiayaan (*finance*) dengan model *direct financing* atau pembiayaan secara langsung. Pada akhir sewa, pihak *lessee* memiliki asset sewa guna usaha yang telah dibayarkan setiap bulannya kepada *lessor*.

Husain dan Wokas, (2016) meneliti tentang Analisis Penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011) Atas Akuntansi *Leasing* Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Manado dalam penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011) atas akuntansi *Leasing* oleh PT. *Federal international finance* Cabang Manado(*FIF*) telah sesuai dengan standar yang berlaku pada PT *Federal international finance* Cabang Manado(*FIF*) menggunakan model akuntansi *leasing capital*, dapat diketahui dari ketentuan dalam surat perusahaan tersebut, yang menyatakan adanya hak opsi bagi pihak pada saat berakhirnya masa, dimana ketentuan ini tergolong dalam satu criteria yang ada pada *capital*.

Negara K.P dan Purnawati, (2012) meneliti tentang Alternatif Pembiayaan Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Antara *Leasing* dan Kredit Bank alternative pembiayaan Kredit lebih murah dibandingkan dengan pembiayaan

dengan *leasing*, ditunjukkan oleh *present value* dari pengeluaran arus kas keluar bersih kedua alternative tersebut dimana Kredit Bank lebih kecil *Present value*.

Setiawan dan Alexander, (2015) meneliti tentang Analisis Penerapan Akuntansi *Leasing* Pada PT. *Federal International Finance* Manado hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan transaksi *leasing* pada PT. *Federal International Finance* Manado (FIF) menggunakan metode *Operating* adalah barang modal yang disewakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan.

Sumual dan Afandi, (2016) meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi *Leasing* Dan Pelaporannya Pada PT. *Astra Sedaya Finance* Di Manado pengakuan dan pengukuran diakhir periode diakui adanya pengalihan kepemilikan, menunjukkan system capital diberlakukan dalam system akuntansi PT. ASF sedangkan pelaporan PT. ASF jelas dimana laporan posisi keungan disusun sesuai PSAK yang berlaku dan pengungkapan catatan atas laporan keungan merupakan dasar standar yang harus sesuai dengan PSAK No.30 PT. ASF telah membuat catatan atas laporan keungan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.

Yanti R dan Arifulsyah H, (2013) meneliti tentang Analisis Akuntansi *Leasing* Pada PT. *Puri Green Resources* Pekanbaru hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam melakukan pencatatan terhadap aktiva yang *di* PT. *Puri Green Resources* menggunakan metode *operating* , padahal dalam ketentuan kontraknya perusahaan tersebut tergolong *capital*

Pankerego dan Budiarmo, (2014) meneliti penerapan PSAK No.30 tentang Perlakuan Akuntansi Sewa Aktiva Tetap Pada PT. *Sinar Karya Mega*

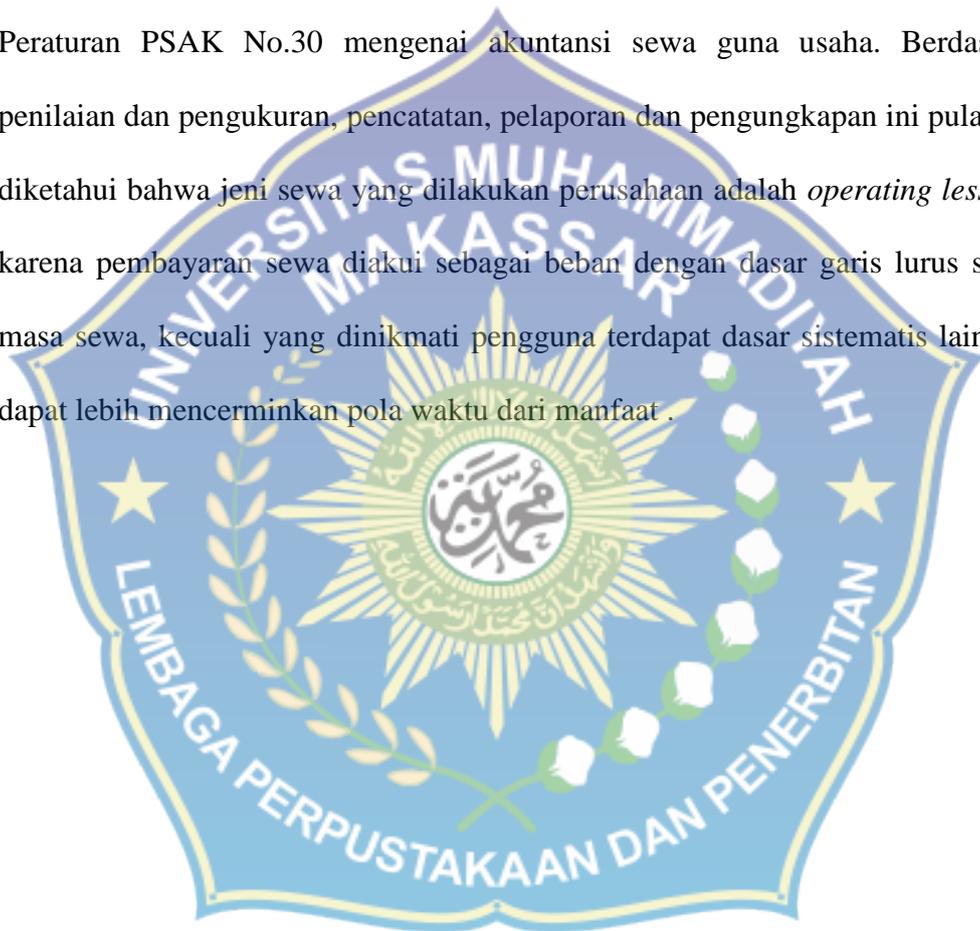
Persada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Sinar Karya Mega Persada tergolong pada sewa operasi (*operating*), karena kegiatan-kegiatan sewa yang dilakukan oleh perusahaan tidak menggambarkan perusahaan melakukan kegiatan sewa pembiayaan (*capital*). Pada akhir masa sewa tidak ada opsi dari lessor untuk menyerahkan peralatan yang disewa menjadi milik dari *lessee*, melainkan peralatan sewa tersebut ditarik kembali dari *lessee* sesuai perjanjian sewa.

Alipudin dan Ningsih, (2015) meneliti tentang Penerapan PSAK No.30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa dan Pengaruhnya Pada Laporan Keuangan PT. BFI. Finance Indonesia, TBK hasil penelitiannya menyatakan bahwa pencatatan atas biaya bunga yang dibayar oleh *lessee* selama masa sewa ditentukan atas dasar nilai tetap untuk setiap periode yang diperhitungkan terhadap jumlah pembayaran sewa minimum dalam tahun yang bersangkutan. Pembebanan bunga dengan tingkat bunga tetap mengabaikan adanya "*time value of money*" yaitu nilai uang pada saat sekarang yang lebih tinggi dari pada dimasa yang akan datang.

Budiarti W dan Hidayati Fadilah D, (2015) meneliti tentang Analisis Perbandingan Pendanaan Asset Tetap Alternative Dengan Pinjaman Bank Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Gasdom) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan atas asset tetap pada PT. Cahaya Gasdom telah menerapkan alternative *leasing* khususnya (*finance*) dalam pendanaan asset tetap yang dibutuhkan. PT. Cahaya Gasdom melakukan pendanaan asset tetap melalui *leasing* terakhir dilakukan untuk pembelian kendaraan truk Mitsubishi F 8837 GM pada tahun 2014 dengan *lessor* yaitu PT. Dispostsar Finance yang beralamat di Gedung Sentrowal Senayan II Lantai 3 dan

4, Jalan Asia Afrika No.8 Jakarta. PT Cahaya Gasdom berencana menambah armada kendaraan untuk distribusi berupa 2 unit Truk.

Rahayu Aisyiyah A.P, (2015) meneliti tentang Penerapan PSAK No. 30 mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap hasil penelitiannya yaitu perusahaan telah melakukan pengungkapan sesuai dengan Peraturan PSAK No.30 mengenai akuntansi sewa guna usaha. Berdasarkan penilaian dan pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan ini pula dapat diketahui bahwa jeni sewa yang dilakukan perusahaan adalah *operating lessee* ini karena pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali yang dinikmati pengguna terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat .



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wulandari dkk, (2016)	Analisis Pembiayaan Melalui <i>Finance Lease</i> dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi <i>Leasing</i> Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tanjung Pinang	Menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif.	berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa criteria klasifikasi sewa guna usaha yang diterapkan didalam PSAK No.30 tentang sewa Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tanjung Pinang merupakan suatu sewa pembiayaan (<i>finance lease</i>) dengan model <i>direct financing lease</i> atau pembiayaan secara langsung. Pada akhir sewa, pihak <i>lessee</i> memiliki asset sewa guna usaha yang telah dibayarkan setiap bulannya kepada <i>lessor</i> .
2.	Husain Y dan Wokas H, (2016)	Analisis Penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011) Atas Akuntansi <i>Leasing</i> Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Manado	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif	dalam penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2011) atas akuntansi <i>Leasing</i> oleh PT. <i>Federal international finance</i> Cabang Manado(FIF) telah sesuai dengan standar yang berlaku pada PT <i>Federal international finance</i> Cabang Manado(FIF) menggunakan model akuntansi <i>leasing capital lease</i> , dapat diketahui dari ketentuan dalam surat <i>lease</i> perusahaan tersebut, yang menyatakan adanya hak opsi bagi pihak <i>lease</i> pada saat berakhirnya masa <i>lease</i> , dimana ketentuan ini tergolong dalam satu criteria yang ada pada <i>capital lease</i> .
3.	Negara Kadek P dan Purnawati K,(2012)	Alternatif Pembiayaan Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Antara <i>Leasing</i> dan Kredit Bank	Menggunakan variable-variabel aliran kas keluar bersih dari sewa guna usaha dan aliran kas keluar bersih dari kredit	alternative pembiayaan Kredit lebih murah dibandingkan dengan pembiayaan dengan <i>leasing</i> , ditunjukkan oleh <i>present value</i> dari pengeluaran arus kas keluar bersih kedua alternative tersebut dimana Kredit Bank lebih kecil <i>Present value</i> -nya

4.	Setiwan Idan Alaxander S, (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi <i>Leasing</i> Pada PT. <i>Federal International Finance</i> Manado	Menggunakan metode analisis deskriptif dan data kualitatif dan kuantitatif	<p>penerapan transaksi <i>leasing</i> pada PT. <i>Federal International Finance</i> Manado (FIF) menggunakan metode <i>Operating Lease</i> adalah barang modal yang disewakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan.</p> <p>penerapan akuntansi <i>leasing</i> yang diterapkan, sesuai dengan PSAK No.30 Tahun 2011 tentang sewa hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam surat kontrak <i>lease</i> pada perusahaan tersebut, yang menyatakan adanya hak opsi bagi pihak <i>lease</i> pada saat berakhirnya masa <i>lease</i>, dimana ketentuan tergolong dalam salah satu criteria yang ada pada <i>capital lease</i>. Manajer keuangan sebaiknya menggunakan metode <i>direct financial leasing</i> saat melakukan pencatatan transaksi melalui metode ini perusahaan dapat memperoleh laba lebih besar dibandingkan dengan metode <i>operating lease</i>.</p>
5.	Sumual M dan Afandi D, (2016)	Perlakuan Akuntansi <i>Leasing</i> Dan Pelaporannya Pada PT. <i>Astra Sedaya Finance</i> Di Manado	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<p>pengakuan dan pengukuran diakhir periode <i>lease</i> diakui adanya pengalihan kepemilikan, menunjukkan system <i>capital lease</i> diberlakukan dalam system akuntansi PT. ASF sedangkan pelaporan PT. ASF jelas dimana laporan posisi keuangan disusun sesuai PSAK yang berlaku dan pengungkapan catatan atas laporan keuangan merupakan dasar standar yang harus sesuai dengan PSAK No.30 PT. ASF telah membuat catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.</p>

				<p><i>leasing</i> mempunyai beberapa tipe dan klasifikasi serta criteria untuk menentukan system akuntansinya. Perlakuan akuntansi dan pelaporannya transaksi <i>leasing</i> pada PT. Astra Sedaya Finance menggunakan system <i>capital lease</i> dimana sewa guna usaha ini dapat mengalihkan kepemilikan pada akhir masa sewa. Berdasarkan aspek pencatatan, pelaporan dan pengungkapan, perlakuan akuntansi <i>leasing</i> pada PT. Astra Sedaya Finance telah sesuai dengan PSAK yang berlaku.</p>
6.	Yanti R dan Arifulsyah, (2013)	Analisis Akuntansi <i>Leasing</i> Pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<p>dalam melakukan pencatatan terhadap aktiva yang <i>dilease</i> PT. Puri Green Resources Pekanbaru menggunakan metode <i>operating lease</i>, padahal dalam ketentuan kontraknya perusahaan tersebut tergolong <i>capital</i> Pencatatan akuntansi <i>leasing</i> pada PT. Puri Green Resources bagaimana menerapkan akuntansi <i>laesing</i> terhadap aktiva yang <i>dilease</i> serta pengaruhnya perlakuan akuntansi <i>leasing</i> terhadap laporan keungan apakah sesuai dengan PSAK No. 30. Dalam melakukan pencatatan terhadap aktiva yang <i>dilease</i>, padahal dalam ketentuan kontraknya perusahaan tersebut tergolong <i>capital lease</i>. Perusahaan tidak melakukan pencatatan perolehan terhadap aktiva yang <i>dilease</i> sehingga perusahaan tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap aktiva yang <i>dilease</i>.</p>
7	Budiarso N dan Pangkerego R,	penerapan PSAK No.30 tentang Perlakuan	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan	<p>hasil penelitian yaitu kegiatan sewa yang dilakukan PT. Sinar Karya Mega Persada tergolong pada sewa operasi</p>

	(2104)	Akuntansi Sewa Aktiva Tetap Pada PT. Sinar Karya Mega Persada	kuantitatif	(<i>operating lease</i>), karena kegiatan-kegiatan sewa yang dilakukan oleh perusahaan tidak menggambarkan perusahaan melakukan kegiatan sewa pembiayaan (<i>capital lease</i>). Pada akhir masa sewa tidak ada opsi dari lessor untuk menyerahkan peralatan yang disewa menjadi milik dari <i>lessee</i> , melainkan peralatan sewa tersebut ditarik kembali dari <i>lessee</i> lsesuai perjanjian sewa.
8.	Alipudin A dan Ningsih Rati P, (2015)	Penerapan PSAK No.30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa dan Pengaruhnya Pada Laporan Keungan PT. BFI. Finance Indonesia, TBK	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan tehnik penelitian non statistic komparatif.	hasil penelitiannya yaitu pencatatan atas biaya bunga yang dibayar oleh <i>lessee</i> selama masa sewa ditentukan atas dasar nilai tetap untuk setiap periode yang diperhitungkan terhadap jumlah pembayaran sewa minimum dalam tahun yang bersangkutan. Pembebanan bunga dengan tingkat bunga tetap mengabaikan adanya " <i>time value of money</i> " yaitu nilai uang pada saat sekarang yang lebih tinggi dari pada dimasa yang akan datang.
9.	Budiarti W dan Hidayati Fadilah Dian, (2015)	Analisis Perbandingan Pendanaan Asset Tetap Alternative <i>Laesing</i> Dengan Pinjaman Bank Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Gasdom)	Metode penelitian analisis data dalam penelitian ini: 1. Pengadaan aset tetap a. Jenis dan jumlah aset tetap b. Penentuan pengadaan aset tetap c. Besarnya kebutuhan dana	hasil penelitian yaitu kebijakan pendanaan atas asset tetap pada PT. Cahaya Gasdom telah menerapkan alternative <i>leasing</i> khususnya (<i>fiannce lease</i>) dalam pendanaan asset tetap yang dibutuhkan. PT. Cahaya Gasdom melakukan pendanaan asset tetap melalui <i>leasing</i> terakhir dilakukan untuk pembelian kendaraan truk Mitshubishi F 8837 GM pada tahun 2014 dengan <i>lessor</i> yaitu PT. Dispotsar Finance yang beralamat di Gedung Sentrowal Senayan II Lantai 3 dan 4, Jalan Asia Afrika No.8 Jakarta. PT Cahaya Gasdom berencana menambah armada kendaraan untuk distribusi berupa 2 unit Truk.

			<p>2. Pendanaan <i>leasing</i></p> <p>a. Besarnya angsuran pokok <i>leasing</i></p> <p>b. Skedul pembayaran pokok dan bunga pendanaan <i>leasing</i></p> <p>c. Menentukan biaya yang boleh dikurangkan dari PPh badan.</p> <p>d. <i>Present Value</i> terhadap <i>cash</i></p>	
10.	Rahayu Aisyiyah Aida P, (2015)	Penerapan PSAK No. 30 mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap	Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara serta menggunakan kuantitatif	hasil penelitiannya yaitu perusahaan telah melakukan pengungkapan sesuai dengan Peraturan PSAK No.30 mengenai akuntansi sewa guna usaha. Berdasarkan penilaian dan pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan ini pula dapat diketahui bahwa jeni sewa yang dilakukan perusahaan adalah <i>operating lessee</i> ini karena pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali yang dinikmati pengguna terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat asset.

D. Kerangka Pikir

Dari uraian diatas beberapa masalah yang sering timbul dalam laporan akuntansi leasing berdasarkan PSAK No. 30 sehubungan dengan kinerja Perusahaan Jasa Transportasi terutama mengenai PSAK No.30 pada *finance lease* antara lain sebagai berikut ini.

Kegiatan Sewa Guna Usaha, dimana penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara skematis sebagai berikut



Gambar 2.1 skema kerangka pikir penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada PT. Bumi Jasa Utama Makassar yang beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Lt. 13 Waktu penelitian kurang lebih dari 2 (dua) bulan dimulai dari awal bulan Mei sampai Juni 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mengadakan peninjauan langsung atau tidak langsung ke lokasi penelitian terhadap aktivitas perusahaan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan. Adapun pelaksanaan penelitian lapangan ini, digunakan teknik pengamatan (*observasi*) yang dilakukan untuk menambah data-data yang actual.
2. Penelitian kepustakaan, (*Library Research*), yaitu agar dapat mendekati kebenaran. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis dan relevan dengan topic penelitian.

C. Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan menurut Mardiasmo (2009), jenis data dibagi sebagai berikut ini.

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala yang numeric (angka).
2. Data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang berhubungan dengan karakteristik berupa kata-kata dan dapat diangkakan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data-data primer yang diperlukan berupa:

- a. Gambaran umum mengenai PT. Bumi Jasa Utama Makassar
- b. Struktur organisasi dan *Job description* PT. Bumi Jasa Utama Makassar
- c. Dokumen perjanjian sewa guna usaha untuk jenis aktiva tertentu yang di oleh PT. Bumi Jasa Utama Makassar.
- d. System dan prosedur akuntansi PT. Bumi Jasa Utama Makassar. termasuk didalamnya adalah jurnal pencatatan untuk transaksi oleh perusahaan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain) umumnya berupa statistic, ataupun keterangan-keterangan dan publikasi lainnya serta bahan-bahan pustaka yang betkaitan dengan topic permasalahan penelitian.

E. Defenisi Operasional

- a. Sewa guna usaha (*leasing*) secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah) pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh sewa guna *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu
- b. Perusahaan penyewa (*Lessee*) adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
- c. perusahaan penyewa (*Lessor*) adalah perusahaan pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk modal dari *lessor*.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah proses pengumpulan, pengujian, dan meringkas berbagai karakteristik data dalam upaya untuk menggambarkan data tersebut secara memadai mengenai perlakuan akuntansi sewa guna usaha menurut perusahaan PSAK No.30 Pada PT. Bumi Jasa Utama Makassar.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Lahirnya PT. Bumi Jasa Utama

Kalla Group merupakan satu kelompok usaha yang terbesar di kawasan Timur Indonesia, kendali usaha yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun bidang usaha ini meliputi otomotif, konstruksi, property, energy, dukungan pendanaan otomotif dan logistic, transportasi dan hutan karbon. Sejalan dengan pesatnya perkembangan di kawasan Timur Indonesia serta sebagai wujud kepedulian dalam mendukung pembangunan di wilayah ini, Kalla Group berkomitmen menciptakan terobosan baru guna memberikan manfaat lebih kepada masyarakat luas di Negara tercinta, Indonesia.

1. Kalla Group :

1. PT. Hadji Kalla (kalla Toyota)
2. PT. Bumi Jasa Utama
3. PT. Baruga Asrinusa Development
4. PT. Bumi Sarana Utama
5. PT. Bumi Lintas Tama
6. Amanah Syariah Finance
7. PT. Kalla Inti Karsa
8. PT. Kars Inti Amanah
9. PT. Bumi Sarana Beton
10. PT. Poso Energi
11. PT. Kalla Electrical system
12. Sekolah Islam Athira

PT. Bumi Jasa Utama (Kallrent) merupakan jasa usaha jasa penyewaan kendaraan dari PT. Bumi Jasa Utama yang lahir dari jaringan bisnis Kalla Group yang telah memiliki pengalaman di dunia usaha selama lebih dari 61 tahun, dengan jaringan kantor cabang pelayanan yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia. Kallarent saat ini telah mampu memberikan kendaraan dari berbagai jenis dan tipe. Melalui dedikasi yang kuat Kallarent mampu memberikan keuntungan dan kepuasan bagi para pelanggannya. Kallarent mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kenyamanan, kepercayaan, ketetapan dan keselamatan melalui pengalaman perusahaan.

Dengan melihat peluang bisnis logistic di tanah air ini terbuka lebar dari kian hari semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk menangani aktivitas logistic. Pertimbangan dalam hal efisiensi dan produktifitas yang lebih tinggi menjadi alasan utama perusahaan memanfaatkan jasa perusahaan logistic.

Maka PT. Bumi Jasa Utama di tahun 2013 pun mengembangkan sayap untuk merambah bisnis logistic. Sebelumnya perusahaan yang didirikan 10 tahun silam ini focus dalam bidang jasa penyewaan kendaraan empat roda yang lebih di kenal dengan nama Kallarent.

2. LOGISTIC SERVICE

1) Shipping

Melayani pengangkutan kendaraan dari port Jakarta ke Port Makassar atau ke Port wilayah lainnya.

2) Car Carrier dan Self Drive

Melayani pengangkutan kendaraan dengan car carrier dan self drive

3) Transportation Services

Melayani jasa transporter dari werehouse ke outlet- outlet dengan mekanisme retasi/tonase

4) Warehousing

Melayani jasa penyewaan dan pengelolaan bangunan.

3. TRAVEL CAHAYA BONE

1. Layanan bus pariwisata, travel angkutan darat dan jasa pengiriman paket.
2. Jasa penyewaan mobil Travel Hi Ace

4. Nilai –Nilai Perusahaan Kallarent

Nilai-nilai perusahaan kalllarent sebagai berikut:

- 1) Komitmen- kami terhadap misi kalla Rent –PT. Bumi Jasa Utama senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai yang menjadi filosofi insane kalla dala kalla way
- 2) Integritas – perusaaan menjalankan usaha dengan kejujuran terhadap diri sendiridan terhadap orang lain, melakukan apa yang telah di sepakati secara professional. “*safety issue*” adalah prioritas utama perusahaan. Senantiasa menjaga keselamatan, keamanan dan kesehatan karyawan serta lingkungan dengan cara minimalisir pencemaran yang terjadi.
- 3) Kualitas- perusahaan berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal untuk mencapai hasil yang memuaskan pelanggan. Senantiasa terus menerus mengembangkan keterampilan dan tteknologi sebagai komitmen perusahaan dalam menjadikan pelanggan sebagai mitra usaha

yang loyal. Siap menghadapi segala bentuk tantangan dan berupaya mengatasi masalah dengan komunikasi dan kerja sama yang baik. Kami berkomitmen untuk senantiasa melakukan inovasi secara terus menerus dan mencari peluang baru dalam mengembangkan usaha.

- 4) Akuntabilitas- perusahaan bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang kami lakukan baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim. Perusahaan akan selalu menerapkan budaya perusahaan sehingga budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme dengan semangat kebersamaan.

5. **Budaya Perusahaan KallaRent**

perusahaan merekrut, melatih dan mempromosikan orang-orang yang terbaik

- 1) Terpercaya – Selalu memberikan motivasi kepada setiap karyawan untuk mengembangkan kinerja dan produktivitas mereka, perusahaan berusaha mendapatkan kepercayaan dari rekanan.
- 2) Komitmen- Taat melaksanakan setiap peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Perusahaan selalu berusaha untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan serta melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
- 3) Kerjasama- Selalu membangun tim kerja profesional dengan focus kepada produktivitas, kolaborasi, kepercayaan, dan hubungan yang saling menguntungkan dengan rekanan, pelanggan dan pemasok.

- 4) Hormat – Menghargai kebudayaan dan keunikan dari berbagai individu dengan cara pandang yang berbeda-beda
- 5) Keterbukaan - Menerapkan system manajemen terbuka dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas

B. VISI dan MISI PT. BUMI JASA UTAMA

Adapun visi dan misi PT. Bumi Jasa Utama sebagai berikut:

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terkemuka dalam jasa usaha transportasi.

2. Misi Perusahaan

Seluruh karyawan PT. Bumi Jasa Utama- Kallarent bekerja sama untuk melayani pelanggan perorangan maupun korporasi yang membutuhkan jasa transportasi. Perusahaan kami berupaya selalu memuaskan keinginan pelanggan dengan standar pelayanan yang aman, nyaman, handal, dan tepat waktu.

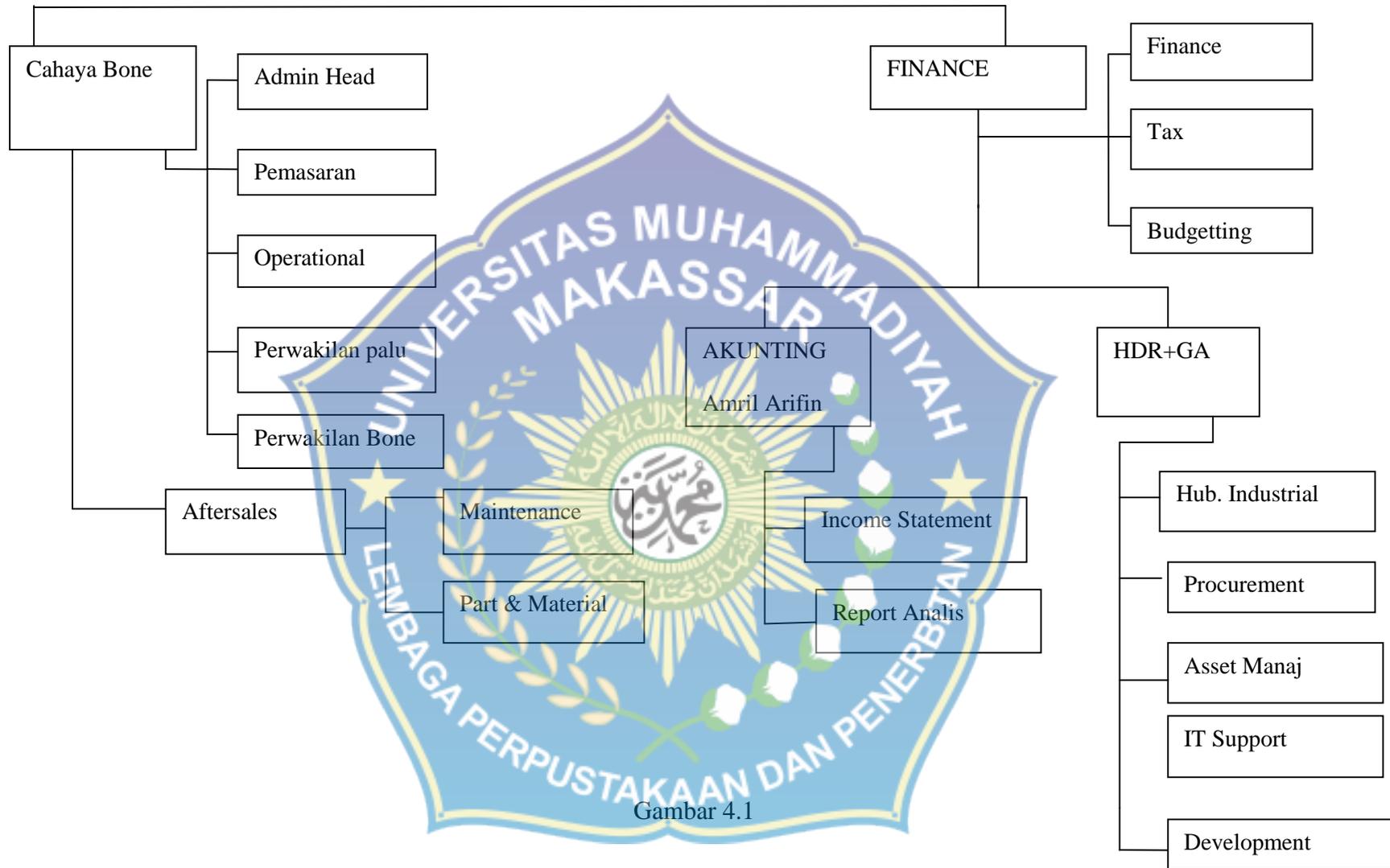
C. Struktur Organisasi

Dalam organisasi segala aktivitas terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktivitasnya, makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, makin kompleks pula hubungan- hubungan dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. struktur organisasi PT. Bumi Jasa Utama Makassar.

STRUKTUR ORGANISASI

PT BUMI JASA UTAMA





Gambar 4.1

C. JOB description

1. General Manager

Pimpinan utama dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab atas terjadinya tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi –fungsi dalam perusahaan. Tujuan dan wewenang General Manager meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang di laksanakan dalam perusahaan.
- c. Membuat peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan.
- d. Memperbaiki dan menyempurnakan segenap bagi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien
- e. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang yang dapat di kerjakan oleh bawahan secara jelas.
- f. Menandatangani semua bukti pengeluaran yang ingin di bayar oleh perusahaan.

2. Bagian Legal

Bagian legal ini merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan General Manager dimana tugas dan fungsi dari bagian legal meliputi:

- a. Membuat dan menganalisa perjanjian (legal drafting) dan mengawal business development.

- b. Membuat pendapat hukum (legal option) dan legal review.
- c. Pengurusan dokumen dan asset milik perusahaan.
- d. Membuat ketentuan peraturan yang baru (UU) baru terkait bisnis perusahaan dan peraturan perusahaan.
- e. Advokasi pendamping kasus perusahaan dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

3. Direktur Operasional

Direktur operasional pada perusahaan merupakan pimpinan dalam divisi operasi yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, dan melaksanakan tugas operasional. Tugas dan wewenang Direktur Operasional:

- a. mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan dan merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasi dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas.
- b. Mengadakan pembinaan, pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang pengembangan.

Direktur operasional membawahi beberapa divisi yaitu Kepala Cabang, National Support, Rental, dan Operation, yang dimana tugas dan fungsi dari masing-masing divisi adalah:

- a. Kepala Cabang berfungsi untuk menyusun strategi penyewaan kendaraan, mengintergrasikan seluruh kegiatan penyewaan kendaraan dalam tingkat yang paling ekonomis/ menguntungkan dan menjaga hubungan baik dengan customer, guna menjamin tercapainya target

penyewaan kendaraan secara efisien, efektif dan sesuai dengan policy perusahaan.

- b. National Support berfungsi untuk mengkoordinir cabang-cabang untuk prospeking dan dealing customer yang berskala nasional dan memastikan semua informasi dan data di update ke cabang-cabang.
- c. Rental berfungsi melakukan prospeking ataupun mengawal proses tender company rent dan memaksimalkan utilisasi unit dengan bentuk sport orderent.
- d. Operation berfungsi untuk membantu kepala cabang dalam mengelola pengemudi dan armada sewa milik PT. Bumi Jasa Utama –KallaRent, bertanggung jawab untuk keselamatan asset yang ada di lingkungan operation, melaporkan aktivitas operasional kepada kepala cabang secara berkala, dan mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan yang melibatkan pengemudi dan kendaraan milik PT. Bumi Jasa Utama.

4. Bagian Logistik

Bagian logistic mempunyai tugas untuk memimpin kejadian yang berkaitan dengan fungsi manajemen penjual meliputi aktivitas ordering, logistic,supply,administrasi kendaraan, sertifikasi dan fasilitasi outlet, serta pengembangan salesforce. Pada bagian ini membawahi divisi vehicle dan General Cargo.

- a. Pada bagian vehicle bertugas untuk mengontrol dan mencatat unit yang masuk, membuat surat perintah pengiriman unit, mengontrol kualitas produksi dan memastikan semua item terpasang, dan

berkoordinasikan dengan vendor terkait evaluasi dan perencanaan produksi.

- b. Pada bagian General Cargo bertugas untuk mengatur pengiriman dan memastikan barang di terima sesuai leadtime, melakukan teknik packing yang aman, efisien dan mudah terkontrol, memilih alternative transportasi pengiriman dengan memperhatikan leadtime dan kualitas, dan melakukan teknik pecking yang aman, efisien dan mudah terkontrol.

5. Bagian Marketing

Bagian marketing berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap semua aspek dbagian pemasaran dalam upaya meraih target penjualan dalam hal pencapaian revenue dan profit perusahaan, atasan langsung ke di Operasional.

Tugas utama dari bagian marketing:

- a. Mengkoordinir seluruh Cabang terhadap pencapaian target sales cabang
- b. Membuat dan menyusun konsep strategi penjualan, untuk membantu cabang dalam mencapai target yang di tentukan.
- c. Membuat rencana tahun marketing (annual plan) untuk mencapai target nasional.
- d. Bertanggung jawab untuk mengikuti proses tender penyewaan kendaraan mulai tahap pendaftaran sampai tahap penawaran harga.

6. Departemen Finance and Accounting

Pada bagian Finance and Accounting pada perusahaan berfungsi untuk mengatur aktivitas keuangan perusahaan melalui mekanisme kegiatan rutin penyewa kendaraan, menyangkut pengadaan, pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bukan Bank (*leasing*) atau lembaga keuangan Bank serta mendukung aspek financial bagi kelancaran kinerja dengan departemen lain, dan seperti:

- a. Menjamin tersedianya dana untuk operational, investasi dan ekspansi perusahaan.
- b. Membuat perencanaan anggaran, perpajakan dan pencatatan aset perusahaan.
- c. Memonitoring dan menganalisa lead time pembayaran AR Cabang – cabang.
- d. Memperhatikan Cost Efisiensi dan Cost efektivitas dan bertanggung jawab terhadap perencanaan pajak (Tax Planning).

Bagian ini juga membawahi divisi-divisi yang antara lain Cahaya Bone, Accounting and Finance, HRD GA yang memiliki masing-masing tugas yang meliputi:

- a. Cahaya Bone merupakan anak perusahaan PT. Bumi Jasa Utama yang memberikan pelayanan dan penyewaan Bus Pariwisata, travel angkutan darat dan pengiriman paket jasa penyewaan mobil travel.
- b. Accounting & Finance mempunyai fungsi dan tugas penyusutan anggaran serta melaporkan keuangan secara berkala, Mendata Aset serta perpajakan, Bertanggung jawab atas laporan keuangan dan analisis atas laporan keuangan setiap akhir bulan, melakukan pencatatan dan pendataan secara

rinci mengenai aset milik PT. Bumi Jsa Utama, bertanggung jawab atas verifikasi serta kecukupan bukti dan prasarat atas setiap proses paying voucher dengan referensi Budget yang telah disepakati, dan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan laporan realisasi Cash Flow.

- c. HRD GA merupakan divisi yang menangani tentang pengelolaan data-data menyangkut kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan tertib administrasi perkantoran serta memelihara aset perubahan sehingga pemanfaatannya dapat lebih efisien dan efektif.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Akuntansi PT. Bumi Jasa Utama

Menurut kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh PT. Bumi Jasa Utama penerimaan kas diukur berdasarkan harga yang terjadi dalam transaksi. PT. Bumi Jasa utama juga mengharapkan jumlah pendapatan yang besar dari penjualan jasa yang berguna untuk memperlancar kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Karena pendapatan ini merupakan pos yang penting, maka perusahaan harus menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan baik mengenai pengakuan maupun pengukuran pendapatan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ada beberapa metode kebijakan dengan yang di gunakan oleh PT. Bumi JasaUtama sebagai berikut:

- 1) Kebijakan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus

Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap yang di miliki perusahaan di gunakan metode garis lurus. Berdasarkan informasi dari perusahaan, umur ekonomis aktiva *lease* memiliki umur ekonomis 5 tahun. Perusahaan menghitung penyusutan peralatan yang di di sewakan dengan cara membagi harga perolehan dengan umur ekonomis aktiva yang di *lease*. Pengungkapan dan pelaporan sewa guna usaha

1. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha oleh PT. Bumi Jasa Utama

Dalam usaha mendukung kelancaran operasional perusahaan, maka perusahaan menambah aktiva tetapnya melalui sumber pembebanan dalam bentuk sewa guna usaha dari pihak *lessor*. Diharapkan dengan menambah aktiva

tersebut perusahaan dapat melakukan usahanya secara optimal. Penerapan transaksi *leasing* pada PT. Bumi Jasa Utama menggunakan metode *capital lease* adalah barang modal yang disewakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva sewa guna usaha berdasarkan harga perolehan. Pembayaran sewa guna usaha (*lease payment*) selama tahun berjalan yang di peroleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha meskipun pembayarannya sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama dalam setiap periode. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan jumlah taksiran masa manfaatnya. Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan.

Dalam hal ini sesuai dalam PSAK No.30 yang terdapat pada paragraph 36 yang berbunyi: pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan hukum di alihkan oleh *lessor* kepada *lessee*, dan dengan penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh *lessor* sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan yang diterima sebagai penggantian dan atas imbalan atas investasi dan jasanya.

Untuk akun pendapatan yang diakibatkan *lessee* atas keterlambatan pembayaran dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati yang biasa disebut dengan denda, dihitung perhari dari tanggal jatuh tempo dikalikan dengan 0,5%. Dalam hal konsumen yang mengalami kesulitan dalam pembayaran denda akibat keterlambatan membayar, maka untuk denda konsumen bisa meminta keringanan

pembayaran denda tersebut kepada pihak perusahaan. Dan perusahaan akan memberikan solusi melalui prosedur tertulis yang harus dilengkapi konsumen dari pihak perusahaan bersangkutan untuk mohon persetujuan keringanan membayar denda konsumen.

Untuk penetapan uang muka, perusahaan menetapkan pembayaran uang muka minimal sebesar 20% dari harga total asset sewa guna usaha. Dan untuk itu biaya administrasi perusahaan setiap tahun berbeda berdasarkan keputusan pihak perusahaan. Untuk mencatat angsuran sewa guna usaha serta beban bunga. Untuk menentukan tingkat bunga asset, pihak *lessor* menetapkan bunga berdasarkan periode sewa pembiayaan atau berdasarkan tahun cicilan yang diambil oleh pihak *lessee* sesuai dengan perjanjian awal.

PT. Bumi Jasa Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi merupakan jasa penyewa kendaraan untuk menjalankan kegiatan milik sendiri atau yang di peroleh dengan cara dibeli. Jika aktiva yang di peroleh dengan cara yang dibeli maka membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu PT. Bumi Jasa Utama sebagai *lessor* mengadakan kontrak perjanjian sewa guna usaha dengan PT. PLN sebagai *Lessee* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Lessor* menyetujui untuk menyewakan 2 unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T, kepada *Lessee* selama 5 tahun dan di mulai pada tanggal 1 Januari 2011, tidak dapat dibatalkan dan memerlukan pembayaran sewa tiap awal tahun Rp 78.763.220 dengan harga pasar Rp 196.908.050
2. Harga perolehan Rp 393.816.100 tanpa nilai residu

3. Penyusutan atas peralatan yang sewa guna usahakan dengan metode garis garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai sisa
4. Besarnya tingkat bunga yang di gunakan sebagai dasar perhitungan beban bunga yang yang di bayar setiap periode adalah 10%
5. Jenis perlatan yang di sewa guna usahakan oleh *lesse* dari *lessor* hanya 2 unit, sehingga nilai peralatan termasuk harga perolehan.
6. Lessor menetapkan sewa untuk mendapatkan hasil (*rate of return*) 10%

Perhitungan penentuan sewa oleh *lessor* adalah sebagai berikut:

Mobil yang <i>dileasekan</i>	Rp 393.816.100
(-) <i>present Vale</i> atas nilai residu	0
Jumlah yang harus di tutup <i>lessor</i> dari	
Penerimaan sewa	Rp 393.816.100
Pembayaran sewa selama 5 tahun	
Dibayar tiap awal tahun, dengan tingkat hasil 10%	
(Rp 393.816.100: 63.010.569)	Rp 6.250.000
Piutang pembayaran sewa = pembayaran sewa minimum minus <i>Executory cost</i>	
<i>lessor</i> plus nilai residu yang tidak di jamin	
= (Rp78.763.220– Rp 2.000.000) X 5) Rp 0	
= Rp 383.816.060	

Pendapatan bunga ditangguhkan (*unearned interest revenue*) adalah selisih antara jumlah piutang sewa dengan nilai pasar aktiva yang *dileasekan*:

Piutang pembayaran sewa = piutang pembayaran sewa minus – harga pasar aktiva

$$\text{Rp}383.816.060 - 196.908.050 = 186.908.010$$

Investasi bersih dalam *direct financing lease* adalah Rp196.908.050 yaitu investasi kotor Rp 196.908.050 dikurangi pendapatan bunga ditangguhkan Rp 186.908.010 Penyewaan Mobil Toyota Avanza, piutang yang timbul dan pendapatan bunga yang ditangguhkan pada tanggal 1 Januari 2011 (saat persetujuan dicatat sebagai :

Piutang pembayaran sewa Rp 186.908.010

Mobil Rp 196.908.050

Pendapatan Rp 383.816.060

Pendapatan bunga ditangguhkan diamortisasi sebagai pendapatan bunga selama umur sewa dengan menerapkan metode bunga efektif. Jadi, akan dihasilkan tingkat hasil yang tetap atas saldo investasi bersih pembayaran kontingen, termasuk sewa yang didasarkan pada variabel – variabel, seperti jam mesin pengguna, volume penjualan, dikreditkan pada pendapatan setelah ditagih. Untuk mengetahui sekedul daftar amortisasi *laesing* yang dilakukan perusahaan dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Daftar Amortisasi *Leasing*
Dasar Anuitas Jatuh Tempo

Tanggal	Pembayaran Sewa Tahunan (1)	Executory Cost (2)	Bunga (10%) (3) = 10*5	Pengembalian piutang(4) -(3)	Investasi Bersih 5-4
1/1/11					393,816,100
1/1/11	78.763.220	2.000.000	0	78.763.220	315.052.880
1/1/12	78.763.220	2.000.000	31.505.288	47.257.932	267.795.592
1/1/13	78.763.220	2.000.000	20.478.373	20.478.373	247.016.033
1/1/14	78.763.220	2.000.000	24.701.603	4.223.230	20.056.050
1/1/15	78.763.220	2.000.000	24.279.280	20.056.050	-
	393.816.100	10.000.000	107.265.730	20.478.373	-

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tanggal 1 Januari 2011,pembayaran sewa tahunan sebesar Rp 78.763.220 investasi bersih dalam *capital lease* Pengembalian investasi Rp76. 632.220 ditambah bunga Rp 31.718.288. Investasi bersih sebesar Rp 315.052.880 dicatat dalam aktiva tetap , kemudian pada tahun pada tanggal 1 Januari 2012 pengembalian piutang sebesar Rp 47.257.932 bunga, 26.779.559 *executor Cost* sebesar Rp 2.000.000 dicatat kedalam aktiva lancar dan investasi bersih sebesar Rp 272.270.064. pada tanggal 1 Januari 2013 pengembalian piutang sebesar Rp 20.478.373, bunga, Rp 24.701.603 *executor Cost* sebesar Rp 2.000.000 dicatat kedalam aktiva lancar dan investasi bersih sebesar Rp 247.016.033. pada tanggal 1 Januari 2014 pengembalian piutang sebesar Rp7.771.506, bunga 25.458.324, *executor Cost* sebesar Rp 2.000.000 dicatat kedalam aktiva lancar dan investasi bersih sebesar Rp 246.811.000. pada tanggal 1 Januari 2015 pengembalian piutang sebesar Rp 20.056.050 bunga 24.279.280, *executor Cost* sebesar Rp 2.000.000 dicatat kedalam aktiva lancar dan investasi bersih sebesar Rp 222.736.753. Jadi bunga yang dibayarkan *lessee*

kepada *lessor* selama 5 tahun diakui sebagai pendapatan oleh *lessor* sebesar Rp 107.265.730 dan pengembalian piutang sebesar Rp 20.478.373

Pada saat pencatatan depresiasi peralatan, karena perusahaan mencatat transaksi perolehan aktiva sewa guna usaha sebagai aktiva tetap, maka setiap akhir tahun harus disusutkan selama periode berjalan. Dalam menghitung depresiasi, perusahaan menggunakan metode depresiasi garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa.

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Beban depresiasi per tahun} &= \frac{\text{harga perolehan} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur ekonomis}} \\ &= \text{Rp } \frac{393.816.100 - 0}{5} \\ &= \text{Rp } 78.763.220 \text{ untuk setiap tahun} \end{aligned}$$

B. PEMBAHASAN

Dari pencatatan transaksi terlihat bahwa perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh perusahaan tergolong *capital lease*. Hal ini karena berdasarkan beberapa syarat yang terdapat dalam perjanjian sewa guna usaha yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK No.30 yaitu sebagai berikut:

- a) Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.

- b) Seluruh pendapatan berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai keuntungannya perusahaan sewa guna usaha (*full payout lease*)`
- c) Masa sewa guna usaha minimal 2 tahun

Sedangkan pengujian criteria sewa guna usaha menurut SFAS No.13 adalah:

- a) Pada akhir masa sewa guna usaha terdapat pemindahan kepemilikan aktiva yang disewa guna usahakan dari *lessor* kepada *lessee*. Dengan membeli peralatan pada akhir masa sewa guna usaha berarti terdapat pemindahan kepemilikan aktiva.
- b) Masa sewa guna usaha sama atau lebih 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang di sewa guna usahan. Masa sewa guna usaha atas aktiva 5 tahun, sedangkan umur ekonomis 5 tahun, berarti telah memenuhi syarat.

Dari penjelasan diatas yang memenuhi criteria *capital lease* adalah criteria 1 dan criteria 2, jadi melalui identifikasi ini dapat diketahui bahwa transaksi sewa guna usaha yang dilakukan oleh PT. Bumi Jasa Utama tergolong *capital lease*.

Hasil penelitian ini berhubungan dengan dengan hasil penelitian oleh Asmiyanti (2014) yaitu untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi *leasing* sudah sesuai dengan PSAK No.30, namun hasil penelitian sebelumnya sewa guna usaha tergolong pada jenis sewa pembiayaan (*capital lease*). Hubungan dengan penelitian ini dengan Rosmiati (2017), yaitu hasil penelitan sewa guna usaha tergolong dengan jenis sewa pembiayaan (*capital lease*) hanya beda pada tempat penelitian

1. Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Menurut PSAK No.30

a. Simpanan Jaminan

Simpanan jaminan merupakan jaminan atas hak opsi *lessee* untuk aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha . jika pada akhir masa sewa guna usaha, *lessee* tidak menggunakan hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa gunausahakan maka simpanan jaminan wajib dikembalikan oleh *lessor* kepada *lessee* tanpa bunga. Dari jurnal yang dibuat terlihat bahwa perusahaan memperlakukan simpanan jaminan sebagai uang muka, padahal simpanan jaminan bagi *lessee* merupakan harta yang pada akhir masa sewa akan dipergunakan untuk membeli peralatan sebesar Rp 90.620.000. Sedangkan pada akhir masa sewa guna usaha tahun 2015, perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli peralatan yang disewa gunausahakan.

Pencatatan Aktiva Sewa Guna Usaha

Dengan menggunakan metode *capital lease*, maka perusahaan akan mencatat harga perolehan peralatan sebagai aktiva tetap yang selanjutnya akan diamortisasi selama umur ekonomisnya. Dalam penyajian asset sewa perusahaan telah menjurnal perolehan peralatan yang disewa sebagai kelompok asset lancar tanpa memisahkan dengan asset lancar lain yang bukan asset sewa, sehingga di dalam laporan posisi keungan tidak tampak nilai perolehan sebenarnya.

Berdasarkan PSAK No. 30 paragraf 07 tentang perlakuan akuntansi sewa dinyatakan sebagai berikut, asset lancar yang disewa dilaporkan sebagai bagian

asset lancar dalam kelompok tersendiri, piutang sewa yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari piutang lainnya.

b. Pencatatan Akumulasi Depresiasi Asset Sewa

Sesuai dengan PSAK No. 30 paragraph 5 dinyatakan bahwa, asset yang disewa harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Perusahaan telah menggunakan metode garis lurus dalam menentukan beban depresiasi atas peralatan dan umur ekonomisasinya 5 tahun. Dalam pencatatan akumulasi depresiasi peralatan, perusahaan mendebit beban depresiasi dan mengkredit akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp 39.381.610 tanpa memisahkan antara peralatan sewa dengan bukan sewa.

Sedangkan pada saat melaporkan beban depresiasi peralatan perusahaan telah mencatat pada tepat sehingga tidak diperlukan jurnal koreksi. Untuk mengetahui lebih rinci berkaitan dengan depresiasi asset sewa dapat dilihat pada

Tabel 5.2
Skedul Beban Depresiasi, Akumulasi Depresiasi
dan Nilai Buku Aset sewa (Rp)

No	Periode	Beban Depresiasi (Rp)	Akumulasi Penyusutan Rp	Nilai Buku (Rp)
1.	1/1/2011			393.816.100
2	1/1/2011	39.381.610	39.381.610	354.434.490
3	1/1/2012	39.381.610	78.763.220	275.671.270
4	1/1/2013	39.381.610	118.144.830	157.526.440
5	1/1/2014	39.381.610	157.526.440	-
6	1/1/2015	39.381.610	196.908.050	-
		196.908.050	590.724.150	-

Sumber : PT. Bumi Jasa Utama (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dengan beban depreiasi pada tahun 2011 sampai tahun ke 2015 sebesar Rp 39.381.610 dan akumulasi penyusutan pada tahun ke 2011 sebesar 39.381.610 sehingga nilai buku pada tahun 2011 sebesar Rp 393.816.100. Seiring berjalannya waktu maka akumulasi penyusutan mengalami peningkatan dan nilai buku selalu mengalami penurunan sehingga total dari beban depresiasi sebesar Rp 196.908.050 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 590.724.150

Dari tabel diatas tampak perusahaan bahwa perusahaan mencatat transaksi perolehan sebagai asset tetap, sehingga setiap akhir tahun perusahaan harus menyusutkan peralatan selama periode berjalan. Dalam menghitung depresiasi, perusahaan menggunakan metode depresiasi garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Dengan adanya skedul tersebut, maka akan mempermudah perusahaan untuk mengetahui nilai buku peralatan sewa setiap akhir periode sewa ataupun peralatan yang ditarik dari penggunaannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Bumi Jasa Utama maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Bumi Jasa Utama menggunakan teknik pembiayaan *Capital lease*. Karena pada akhir masa sewa, pihak *lessee* memiliki asset yang disewagunausahakan.
2. PT. Bumi Jasa Utama mengakui asset berupa piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah dengan investasi neto. Untuk dasar pengungkapan sewa PT. Bumi Jasa Utama mengungkapkan pendapatan pada laporan laba rugi dan disajikan dalam posnya masing-masing seperti pendapatan perusahaan dari pihak *lessee*.
3. Transaksi leasing yang terjadi pada PT. Bumi Jasa Utama Makassar tergolong dalam transaksi *capital lease* menurut PSAK No. 30 tentang akuntansi *leasing* (sewa guna usaha). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam surat kontrak *lease* pada perusahaan tersebut yang menyatakan adanya hak opsi bagi pihak *lessee* pada saat berakhirnya masa *lease*, dimana ketentuan tersebut dalam salah satu kriteria yang ada pada *capital lease*.
4. Pada saat awal perolehan peralatan yang di *lease* seharusnya perusahaan mencatat dan membukukan harga perolehan aktiva sewa guna usaha

berdasarkan nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa di tambah nilai tunai hak opsi.

5. Akumulasi penyusutan aktiva leasing harus di ungkapkan dan di sajikan terpisah dengan aktiva tetap yang di miliki perusahaan. Kemudian menyajikan sesuai dengan taksiran umur ekonomis serta di perhatikan kapan aktiva yang di sewagunausahakan di peroleh.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Hendaknya Perusahaan dapat mengikuti standar akuntansi keungan yang berlaku dan mencatat serta menyajikan perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap sesuai dengan PSAK No.30. untuk itu penulis memberikan bahan masukan sebagai saran bagi perusahaan supaya dapat menyajikan laporan keungan yang wajar dan lebih di pahami.



DAFTAR PUSTAKA

- Alipudin A dan Ningsih Rati P, 2015. *Penerapan PSAK No.30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa dan Pengaruhnya Pada Laporan Keuangan PT. BFI. Finance Indonesia, TBK.*
- Budiarti W dan Budiarti Fadilah D, 2015. *Analisis Perbandingan Pendanaan Asset Tetap Alternative Dengan Pinjaman Bank Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus Pada PT. Cahaya Gasdom.*
- Direktorat, 2008. *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak.
- Frianto dkk, 2005. *Lembaga Keuangan.* Jakarta : Fineka Cipta.
- Herman, 2006. *Pasar Finansial & lembaga-Lembaga Finansial.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Husein Y dan Wokas H, 2016. *Analisis Penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011) Atas Akuntansi Leasing Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Manado*
- Iman, 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah.* Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Indonesia, Ikatan Akuntan, 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30* Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Negara, Kadek P, dan Ni Ketut P, 2012. *Alternatif Pembiayaan Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Antara Leasing dan Kredit.*
- Pangkerego Revine M dan Budiarmo N, 2104. *penerapan PSAK No.30 tentang Perlakuan Akuntansi Sewa Aktiva Tetap Pada PT. Sinar Karya Mega Persada*

- Pernyataan Standars Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30,2007. Tentang Sewa, Revisi 2011
- Rahayu Putri Aida A, 2015. *Penerapan PSAK No. 30 mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap.*
- Setiawan I dan Alaxander S, 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Leasing Pada PT. Federal International Finance*
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & B.* Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Estralita, 2011. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumual M dan Afandi D, 2016. *Analisis Perlakuan Akuntansi Leasing Dan Pelaporannya Pada PT. Astra Sedaya Finance Di Manado.*
- Wulandari dkk, 2016. *Analisis Pembiayaan Melalui Finance dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tanjung Pinang*
- Yanti R dan Arifulsyah H, 2012. *Analisis Akuntansi Leasing Pada PT. Puri Green Resources Pekanbaru.*

RIWAYAT HIDUP



Rosmiati lahir pada tanggal 27 desember 1994 di Buntu Corre tepatnya Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Pepandangan. Anak ketiga dari 3 bersaudara, Putri pasangan dari Ayah Reddo dan Ibu Suherni. Penulis memulai memasuki jenjang pendidikan Formal di SDN 170 Dakdah pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Baraka dan tamat pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Madrasah Aliyah Baraka (MAN BARAKA) dan tamat pada tahun 2013. Di tahun yang sama penulis mendaftar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar sehingga penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi program Strata Satu (SI).